



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA)

2026



**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, maka dengan Undang-Undang ini kita dapat mengetahui satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai Pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 272- 273), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 (Pasal 11) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional secara sistematis, terarah, menyeluruh, terukur dan tanggap terhadap perubahan.

Tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal Renja PD, penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD, perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan yang terakhir penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, oleh karenanya Rencana Kerja Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RENSTRA Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Selain itu juga dengan mendukung pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yaitu misi pertama (1) dalam rangka meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan SDM yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global serta misi ketiga (3) yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsive dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas, dan program Asta Cita serta dalam rangka implementasi 136 program prioritas/intervensi/aksi /taktis Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dimana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah fokus dan mendukung pada program intervensi yaitu digitalisasi manajemen kearsipan dan pada peningkatan dan perluasan akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid serta penyempurnaan layanan kearsipan dinamis berbasis TI dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.2 Landasan Hukum

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
15. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
21. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Tengah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
38. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dearah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
39. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Tahun 2026, dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yaitu :

- 1) Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, dan dapat menjamin konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, penyusunan strategi sampai dengan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (rencana operasional tahunan);
- 2) Sebagai pedoman dan alat ukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pada urusan Perpustakaan dan Kearsipan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas dan jelas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dari Rencana Kerja tahun 2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan capaian Renstra PD Tahun 2024 -2026, analisa kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD serta review terhadap Renstra PD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah serta manajemen resiko strategis perangkat daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

Memuat perumusan tujuan dan sasaran Rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026. Kemudian menjabarkan tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatif untuk tahun 2026 yang kemungkinan mengalami perubahan serta manajemen resiko program dan kegiatan PD Tahun 2026.

BAB V PENUTUP.

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 memberikan informasi tingkat ketercapaian target kinerja terhadap kondisi akhir Renstra, faktor pendukung maupun faktor penghambat, yang bermanfaat untuk menentukan strategi dan kegiatan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2026.

Pelaksanaan urusan kearsipan dan perpustakaan Tahun 2025 sesuai dengan Permendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga beberapa target indikator kinerja mengalami penyesuaian serta perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2024 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan didukung dengan Anggaran sebesar Rp.50.633.003.000,- terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.43.305.904.000,- yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.15.902.323.000,- dan Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.27.403.581.000,- Belanja Modal sebesar Rp.7.327.099.000,- dan APBN melalui Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 435.287.000,- dari Perpustakaan Nasional RI.

Realisasi anggaran dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp.49.580.698.322,- (97,92%), terdiri dari realisasi keuangan bidang kearsipan sebesar Rp.877.754.531,- (99,58%), realisasi keuangan bidang perpustakaan sebesar Rp16.896.832.566,- (99,58%), dan realisasi keuangan urusan penunjang sebesar Rp.31.806.111.225,- (97,02%). Efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.052.304.678,- (2,08%), sedangkan untuk realisasi Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.409.270.500,- (94,02%) untuk melaksanakan 5 Program, 24 Kegiatan, 58 Sub Kegiatan dan 102 sub-sub kegiatan, yang terdiri dari satu Program Kegiatan Rutin (Ex BAU), satu Program Urusan Wajib Kearsipan dan satu Program Urusan Wajib Perpustakaan.

Urusan Kearsipan terdiri dari dua program yaitu Program Pengelolaan Arsip dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan indikator program sebanyak 5 indikator, adapun capaian indikator program sebanyak 5 indikator melebihi target yaitu Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya dengan capaian target 146,90%, Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK dengan capaian target 178,26%, Persentase peningkatan pengunjung arsip dengan capaian target 187,37%, Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip dengan capaian target 102,54%, dan Persentase arsip yang diselamatkan dengan capaian target 133,38%.

Sedangkan urusan perpustakaan dilaksanakan melalui dua program yaitu Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi

Nasional dan Naskah Kuno dengan indikator program sebanyak 4 indikator, adapun capaian indikator program sebanyak 1 indikator memenuhi target yaitu Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca dengan capaian target 100%, dan sebanyak 3 indikator program melebihi target yaitu, Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi dengan capaian target 103,44%, Nilai survey kepuasan masyarakat dengan capaian target 106,25%, dan Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan capaian target 101,57%.

Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diantaranya, Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip dengan tingkat ketercapaian 100% (target 41 unit realisasi 41 unit), Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi untuk pemusnahan arsip (retensi <10 tahun) dengan tingkat ketercapaian 100% (target 5 OPD realisasi 5 OPD), Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi dengan tingkat ketercapaian 100% (target 5 unit realisasi 5 unit), Jumlah Pustakawan yang lulus sertifikasi dengan tingkat ketercapaian 100% (target 10 orang realisasi 10 orang), Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat ketercapaian 100% (target 6 jenis realisasi 6 jenis), Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat dengan tingkat ketercapaian 100% (target 2 kegiatan realisasi 2 kegiatan), Jumlah masyarakat yang menjadi agen literasi dengan tingkat ketercapaian 100% (target 20 orang realisasi 20 orang), Jumlah Penerbit yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Umum Prov Jateng dengan tingkat ketercapaian 100% (target 184 unit realisasi 184 unit), Jumlah naskah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan dengan tingkat ketercapaian 100% (target 2 dokumen realisasi 2 dokumen), Jumlah koleksi naskah kuno yang dialihmediakan dengan tingkat ketercapaian 100% (target 25 eksemplar realisasi 25 eksemplar).

Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diantaranya Jumlah unit LKD Prov/Kab/Kota dan Perangkat Daerah yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya dengan tingkat ketercapaian 145% (target 20 unit realisasi 29 unit), Jumlah arsip dinamis inaktif Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian dengan tingkat ketercapaian 221,90% (target 1.000 arsip realisasi 2.219 arsip), Jumlah arsip statis yang tersusun daftar inventarisnya dengan tingkat ketercapaian 134,62% (target 10.500 dokumen realisasi 14.135 dokumen), Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik melalui SIKD dengan tingkat ketercapaian 133,02% (target 71,42% realisasi 95%), Jumlah arsip yang terlayankan dengan tingkat ketercapaian 121,25% (target 800 arsip realisasi 970 arsip), Jumlah Arsip yang terselamatkan akibat bencana berskala Provinsi dengan tingkat ketercapaian 116,67% (target 150 arsip realisasi 175 arsip), Jumlah khazanah arsip statis LKD Provinsi yang dialihmediakan dengan tingkat ketercapaian 103,40% (target 256.500 arsip realisasi 265.217 arsip), Persentase peningkatan koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat ketercapaian 120,41% (target 4,90% realisasi 5,90%), Jumlah pengunjung Perpustakaan Umum Provinsi

Jawa Tengah dengan tingkat ketercapaian 115,69% (target 2.657.000 orang realisasi 3.073.789 orang), Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yang diolah dengan tingkat ketercapaian 101,91% (target 367 eksemplar realisasi 374 eksemplar).

Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya bahkan melebihi target kinerja program dan kegiatan dalam urusan kearsipan dan perpustakaan antara lain adalah adanya perencanaan yang matang serta pelaksanaan program yang terkoordinasi dengan baik di seluruh perangkat daerah. Peningkatan kapasitas dan komitmen SDM dalam pengelolaan arsip dan pengembangan perpustakaan turut mendukung tercapainya target, termasuk penerapan sistem digital seperti SIKD yang mempercepat dan mempermudah proses kearsipan. Selain itu, kolaborasi yang kuat antarinstansi, meningkatnya kesadaran akan pentingnya arsip dan literasi, serta dukungan partisipatif dari masyarakat dan lembaga pendidikan juga menjadi pendorong utama keberhasilan. Upaya intensif dalam sosialisasi, pembinaan, fasilitasi, serta pelestarian koleksi dan budaya lokal memperkuat kinerja program, sehingga capaian indikator melebihi target yang telah ditetapkan.

Implikasi yang timbul terhadap capaian program/kegiatan Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan yaitu seluruh indikator kinerja memenuhi dan melebihi target. Capaian target dimaksud menjadi bagian tercapainya renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil dengan menyesuaikan dan atau berpedoman pada Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yaitu “Jawa Tengah yang semakin Sejahtera dan Lestari”, yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Hasil reviu capaian kinerja Renja tahun 2024 dan Perkiraan capaian tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Pencapaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan s/d Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN KEARSIPAN										
I	Program Pengelolaan Arsip	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	%	32,89	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	25,97	38,15	146,90	30,26	30,26	100

1	Keg. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah unit LKD Prov/Kab/Kota dan Perangkat Daerah yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya	Unit	25	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	20	29	145	23	23	100
2	Keg. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik melalui SIKD	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	71,42	95	133,02	85,36	85,36	100
II	Program Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	100	178,26	178,26	100	100	100
1	Keg. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah arsip dinamis inaktif Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian	Arsip	4.500	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	1.000	2.219	221,90	1.500	1.500	100

2	Keg. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah arsip statis yang tersusun daftar inventarisnya	Dokumen	36.370	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	10.500	14.135	134,62	12.000	12.000	100
III	Program Pengelolaan Arsip	Persentase peningkatan pengunjung arsip	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	19	35,60	187,37	79	79	100
1	Keg. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah arsip yang terlayankan	Arsip	3.000	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	800	970	121,25	1.000	1.000	100
2	Keg. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	Unit	123	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	41	41	100	41	41	100

IV	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang diselamatkan	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	19,47	25,97	133,38	65,92	65,92	100
1	Keg. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Jumlah Arsip yang terselamatkan akibat bencana berskala Provinsi	Arsip	1.500	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	150	175	116,67	500	500	100
2	Keg. Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah khazanah arsip statis LKD Provinsi yang dialihmediakan	Arsip	283.370	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	256.500	265.217	103,40	272.000	272.000	100
V	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	%	22,50	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	12,19	12,50	102,54	20	20	100

1	Keg. Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi untuk pemusnahan arsip (retensi <10 tahun)	OPD	9	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	5	5	100	8	8	100
	URUSAN PERPUSTAKAAN										
VI	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai	80	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	80	85	106,25	80	80	100
1	Keg. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	Jenis	12	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	6	6	100	10	10	100
2	Keg. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	%	15	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	4,9	5,9	120,41	5	5	100

3	Keg. Kebudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi agen literasi	Orang	60	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	20	20	100	20	20	100
4	Keg. Kebudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengunjung Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	Orang	7.971.000	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	2.657.000	3.073.789	115,69	2.657.000	2.657.000	100
VII	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	80,56	83,33	103,44	88,89	88,89	100
1	Keg. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi	Unit	25	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	5	5	100	8	8	100

2	Keg. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pustakawan yang lulus sertifikasi	Orang	60	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	10	10	100	20	20	100
VIII	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	23,08	23,08	100	61,54	61,54	100
1	Keg. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	Kegiatan	9	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	2	2	100	3	3	100
IX	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	84,67	86	101,57	92,25	92,25	100

[illegible]

X	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	100	100	100	100	100	100
1	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	1	1	100	1	1	100
2	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	3	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	1	1	100	1	1	100
3	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	100	100	100	100	100	100

4	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	100	100	100	100	100	100
5	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	173	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	2	18	900	0	0	100
6	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	24	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	8	8	100	8	8	100
7	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	405	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	135	154	114,07	50	50	100

XI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	100	100	100	100	100	100
1	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	Perubahan indikator kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja tahun 2024-2026	100	100	100	100	100	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah didasarkan atas indikator Program pada Renstra PD 2024-2026 dengan menyajikan Realisasi capaian pada tahun 2024 dan proyeksi capaian pada tahun 2025, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikaor	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
				2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Kearsipan							
1	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya			26,32%	30,26%	38,15%	30,26%	
2	Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK			100%	100%	178,26%	100%	
3	Persentase peningkatan pengunjung arsip			19%	79%	35,60%	79%	

No	Indikaor	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
				2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Persentase arsip yang diselamatkan			32,96%	65,92%	25,97%	65,92%	
5	Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip			17,5%	20%	12,50%	20%	
	Urusan Perpustakaan							
1	Nilai survey kepuasan masyarakat			80 nilai	80 nilai	85 nilai	80 nilai	
2	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi			80,56%	88,89%	83,33%	88,89%	
3	Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca			23,08%	61,54%	23,08%	61,54%	
4	Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal			84,67%	92,25%	86%	92,25%	

No	Indikaor	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
				2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah							
	Non Urusan							
1	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	
2	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan kearsipan dan urusan perpustakaan, dimana aktivitas utama kedua urusan tersebut yaitu pengelolaan informasi.

Penyelenggaraan kearsipan daerah, baik pembangunan maupun proses penyelenggaraannya, harus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pemerintah Jawa Tengah sehingga peran dan fungsi arsip sebagai alat bukti yang sah, bukti akuntabilitas kinerja, identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dapat dioptimalkan untuk mendukung dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berperadaban tinggi

Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan dengan jelas mengenai hak, kewajiban dari masyarakat serta kewenangan dari pemerintah. Semua lapisan masyarakat baik itu daerah terpencil, terisolasi dan terbelakang, masyarakat yang sehat, cacat atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau social, semuanya mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan dari perpustakaan. Masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga, memelihara, mengikuti setiap peraturan dari perpustakaan.

a. Mengingat pentingnya peran arsip dan perpustakaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada masyarakat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan harus mampu menyediakan layanan yang efektif, inovatif dan adaptif. Sejalan dengan arahan nasional yaitu percepatan penerapan aplikasi kearsipan berbasis elektronik untuk menjamin ketersediaan arsip autentik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas melalui pemanfaatan perpustakaan, dan Tujuan Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah “Jawa Tengah yang semakin Sejahtera dan Lestari“ Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, memiliki fungsi diantaranya:

a) perumusan kebijakan Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan, Pengelolaan dan Pelestarian Arsip, Layanan dan Pemanfaatan Arsip, Pengelolaan Perpustakaan, Pengembangan Perpustakaan;

- b) pelaksanaan kebijakan Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan, Pengelolaan dan Pelestarian Arsip, Layanan dan Pemanfaatan Arsip, Pengelolaan Perpustakaan, Pengembangan Perpustakaan;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan, Pengelolaan dan Pelestarian Arsip, Layanan dan Pemanfaatan Arsip, Pengelolaan Perpustakaan, Pengembangan Perpustakaan;
- d) pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

b. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi

1. Bidang Perpustakaan

- a) Tingkat Ketercukupan Koleksi bahan perpustakaan lingkup daerah maupun nasional, deposit karya cetak dan karya rekam, pelestarian dan penelitian bahan perpustakaan, termasuk naskah nusantara sebagai warisan dokumenter bangsa masih kurang;
- b) Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan SK jabatan fungsional, mempunyai kualifikasi bidang perpustakaan, informasi dan dokumentasi, belum memadai dengan jumlah penduduk di Jawa Tengah;
- c) Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan/Pemustaka masih rendah.

2. Bidang Kearsipan

- a) Penyelenggaraan kearsipan daerah saat ini belum terpadu, sistemik, dan komprehensif Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kearsipan baik pelaku dan penyelenggara kearsipan;
- b) Kearsipan belum optimal dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu;
- c) Ketentuan dan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan masih bersifat parsial dan tersebar

dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga perlu disiapkan kebijakan sistem kearsipan nasional untuk dapat menjadi pedoman tatakelola dan tatalaksana dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.

- d) Ketersediaan sumber daya penyelenggaraan kearsipan, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun sumber daya kearsipan lainnya masih belum memadai.

c. Dampak Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Adapun Tujuan Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah “Jawa Tengah yang semakin Sejahtera dan Lestari“

Sasaran :

- 1) Meningkatnya perekonomian Tangguh dan Berdaya Saing dan Berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Berkarakter, dan Adaptif;
- 3) Meningkatnya Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 4) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran tersebut di atas, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah turut berpartisipasi dalam perwujudan Sasaran Pembangunan Daerah ke-2 yaitu Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Berkarakter, dan Adaptif dan ke-4 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis.

d. Tantangan dan Peluang

Tantangan

Kearsipan

- a. Meningkatkan Keamanan dan Privasi Arsip elektronik dari pencurian data, kebocoran informasi, dan serangan siber;
- b. Meningkatkan Kesadaran masyarakat dan instansi dalam memahami pentingnya arsip;
- c. Meningkatkan Kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif;
- d. Meningkatkan sarana prasarana termasuk teknologi dan infrastruktur;
- e. Melaksanakan migrasi ke Arsip Digital dan perubahan budaya kerja.

Perpustakaan

- a. Melaksanakan adaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk tetap relevan dengan kebutuhan pengguna di era digital;
- b. Peningkatan Kapasitas SDM yang kompeten dan berkualitas untuk menjadi agen informasi, dan agen perubahan, serta mampu menguasai teknologi informasi;
- c. Meningkatkan pengembangan Perpustakaan Digital.

Peluang

Kearsipan

- a. Pemerintah Daerah perlu menjamin Keamanan dan Privasi data;
- b. pengembangan Big Data Kearsipan Daerah Provinsi (big archives), sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- c. Meningkatkan akses dan layanan arsip digital guna peningkatan dan perluasan terhadap pemanfaatan arsip untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perpustakaan

- a. Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya perpustakaan sebagai pusat pembelajaran aktif, hubungan inovasi, dan pusat pengembangan masyarakat melalui teknologi dan informasi;
- b. Peningkatan koleksi perpustakaan berbasis budaya lokal (local content) untuk menarik dan meningkatkan minat baca serta ketertarikan masyarakat terhadap layanan dan koleksi perpustakaan;
- c. Pengembangan perpustakaan sebagai pusat repository warisan dokumenter intelektual bangsa dalam format digital bertujuan memberikan kemudahan dan keamanan terhadap akses data dan informasi.

e. Formulasi Isu-isu Penting

Berdasarkan permasalahan dan hambatan yang telah diuraikan sebelumnya, maka beberapa alternatif rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas di tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pengelolaan sistem kearsipan dan perpustakaan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi;

- 2) Peningkatan kompetensi SDM pengelola kearsipan dan perpustakaan;
- 3) Peningkatan kemudahan akses informasi arsip dan perpustakaan untuk masyarakat melalui peningkatan sarpras untuk mendukung teknologi informasi;
- 4) Pemberdayaan lembaga kearsipan dan perpustakaan melalui sosialisasi bidang kearsipan dan perpustakaan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan dengan prediksi pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD. Renja disusun untuk menjabarkan Renstra, menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2026 disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen, perlu dilakukan reviu terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	Program Pembinaan Perpustakaan	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80 nilai	1.558.500	Program Pembinaan Perpustakaan	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80 nilai	1.558.500
2	Program Pembinaan Perpustakaan	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan jumlah Perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	100%	775.000	Program Pembinaan Perpustakaan	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan jumlah Perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	100%	775.000
3	Program Pembinaan Perpustakaan	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	100%	360.000	Program Pembinaan Perpustakaan	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	100%	360.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
4	Program Pelestarian Koleksi Naskah Kuno	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	100%	42.304	Program Pelestarian Koleksi Naskah Kuno	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	100%	42.304
5	Program Pengelolaan Arsip	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase LKD Provinsi/Kab/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	32,89%	725.000	Program Pengelolaan Arsip	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase LKD Provinsi/Kab/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	32,89%	725.000
6	Program Pengelolaan Arsip	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Provinsi sesuai NSPK	100%	606.845	Program Pengelolaan Arsip	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Provinsi sesuai NSPK	100%	606.845
7	Program Pengelolaan Arsip	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Pengunjung Arsip	100%	750.000	Program Pengelolaan Arsip	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Pengunjung Arsip	100%	750.000
8	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase arsip yang diselamatkan	100%	120.756	Program Perlindungan dan	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase arsip yang diselamatkan	100%	120.756

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
						Penyelamatan Arsip				
9	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	22,5%	123.860	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	36 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	22,5%	123.860

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki Program/Kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
NIHIL					

A. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional menjadi salah satu rujukan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, antara lain Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dengan tema **“Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”**, dengan prioritas daerah **“Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis, dan Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter”**. Prioritas daerah dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai RPJMD, dan juga dalam rangka untuk membangun sinergi, keselarasan, kerja sama, kolaborasi, dan sinkronisasi antarsektor agar pembangunan dapat berjalan dengan maksimal, serta mendukung pencapaian Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk mewujudkan kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan rakyat, dari swasembada pangan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan kesehatan hingga penguatan pertahanan negara. Program prioritas ini juga mencakup perlindungan hak perempuan, anak, dan disabilitas, pelestarian budaya dan lingkungan, serta pengembangan kota yang inovatif dan mandiri, termasuk IKN, demi Indonesia yang lebih adil dan berdaya saing global.

Sinergi prioritas nasional atau Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yaitu **“Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur”** dan **“Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”** melalui Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi, Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN, Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat, Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi, Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan pembuatan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) adalah untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan tahunan, memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Renja Perangkat Daerah (PD) juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah

Sasaran utama pembuatan RENJA (Rencana Kerja) Perangkat Daerah (PD) adalah untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan dalam

satu tahun, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan penyusunan anggaran. RENJA juga berfungsi untuk memastikan keselarasan antara perencanaan strategis jangka panjang dengan perencanaan tahunan

Tujuan dan Sasaran Renja tahun 2026 merujuk kepada Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, mendukung Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Jawa Tengah 2025-2029 yaitu “Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis, dan Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter”.

Adapun tujuan yang akan dicapai yaitu :

- 1. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan kearsipan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Meningkatkan literasi masyarakat
- 3. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis

Sedangkan Sasaran yang akan dicapai yaitu:

- 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Prov Jateng
- 2. Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat
- 3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Tujuan, sasaran dan indikator serta targetnya diuraikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah (nama PD) Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan kearsipan Provinsi Jawa Tengah *				
			Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah *	Angka	96,27
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Prov Jateng **			
			Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga	Angka	97,29

			Kearsipan Daerah Provinsi **		
			Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya ***	%	44,74
			Jumlah Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya minimal baik ****	Lembaga	34
			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan *****	Lembaga	117
			Jumlah OPD, BUMD, Ormas, Orpol yang mendapatkan pembinaan kearsipan ****	Instansi	51
			Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis *****	Instansi	51
			Jumlah arsiparis yg tersertifikasi di Provinsi Jawa Tengah ****	Orang	5
			Jumlah arsiparis *****	Dokumen	1
			Persentase pengelolaan arsip statis provinsi ***	%	79,15
			Jumlah arsip statis yang terkelola ****	Arsip	146012
			Jumlah Orang yang diwawancarai *****	Orang	2
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi *****	Arsip	1500
			jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi *****	Arsip	13500
			Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat	%	44,74

			daerah provinsi yang meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipannya ***		
			Jumlah Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota yang meningkatkan nilai pengawasan kearsipannya minimal baik ****	Lembaga	34
			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan *****	Lembaga	117
			Jumlah OPD, BUMD, Ormas, Orpol yang mendapatkan pembinaan kearsipan ****	Instansi	51
			Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis *****	Instansi	51
			Jumlah arsiparis yg tersertifikasi di Provinsi Jawa Tengah *****	Orang	5
			Jumlah arsiparis *****	Dokumen	1
			Persentase pengelolaan arsip statis provinsi ***	%	79,15
			Jumlah arsip statis yang terkelola ****	Arsip	146012
			Jumlah Orang yang diwawancarai *****	Orang	2
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi *****	Arsip	1500
			jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi *****	Arsip	13500
			Persentase peningkatan OPD yang mampu melaksanakan pemusnahan arsip inaktif/masa retensi habis ***	%	66,67
			Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, penetapan dan	Arsip	10000

			pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 thn ****		
			Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun *****	Arsip	10000
			Persentase pemulihan arsip akibat bencana ***	%	20,34
			Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi , identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan akibat bencana ****	Arsip	11,4
			Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana *****	Arsip	600
			Persentase peningkatan arsip yang diselamatkan melalui alihmedia ***	%	11,4
			Jumlah Arsip yang dialih-mediakan ****	Arsip	20,34
			Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip *****	Arsip	670
			Persentase arsip bersejarah yang ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB) **	%	50
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ***	Angka	85,7
			Jumlah Arsip yang terlayankan ****	Arsip	1000
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah	Pengguna	3500

			Provinsi Melalui JIKN *****		
			Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip *****	Unit	41
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi *****	Laporan	4
	Meningkat kan literasi masyaraka t *				
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) *	Angka	15,76
		Meningkatn ya kegemaran membaca masyarakat **			
			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (NTGM) **	Angka	76,7
			Persentase penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai SNP ***	%	45,27
			Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi *****	Perpustakaan	4
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan *****	Dokumen	1
			Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan *****	Perpustakaan	10
			Jumlah Pustakawan yang lulus Sertifikasi *****	Orang	25
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan	Orang	30

			Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi *****		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah sesuai kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya sesuai SNP *****	Perpustakaan	270
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan *****	Perpustakaan	10
			Jumlah pembudayaan gemar membaca di satuan pendidikan menengah, dan khusus *****	Kegiatan	2
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus *****	Lokus	13
			Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat *****	Kegiatan	2
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca *****	Orang	12
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya *****	Orang	1
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ***	Angka	85,2
			Peningkatan jumlah koleksi Perpustakaan	%	5

			Provinsi Jawa Tengah ****		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan ****	Eksemplar	10386
			Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ****	Jenis	12
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya ****	Perpustakaan	6
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK ****	Perpustakaan	1
			Jumlah kunjungan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ****	Orang	3166650
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat ****	Dokumen	1
			Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan TPBIS yang diselenggarakan di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ****	Orang	1070
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan ****	Perpustakaan	1
			Persentase penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai SNP ***	%	45,27
			Jumlah Perpustakaan	Perpustakaan	4

			kewenangan provinsi yang terakreditasi ****		
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan *****	Dokumen	1
			Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan *****	Perpustakaan	10
			Jumlah Pustakawan yang lulus Sertifikasi ****	Orang	25
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi *****	Orang	30
			Jumlah Perpustakaan Sekolah sesuai kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya sesuai SNP *****	Perpustakaan	270
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan *****	Perpustakaan	10
			Jumlah pembudayaan gemar membaca di satuan pendidikan menengah, dan khusus *****	Kegiatan	2
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus *****	Lokus	13

			Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat ****	Kegiatan	2
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca *****	Orang	12
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya *****	Orang	1
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ***	Angka	85,2
			Peningkatan jumlah koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah *****	%	5
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan *****	Eksemplar	10386
			Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah *****	Jenis	12
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya *****	Perpustakaan	6
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK *****	Perpustakaan	1
			Jumlah kunjungan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah *****	Orang	316665 0
			Jumlah koleksi perpustakaan	Dokumen	1

			(cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat *****		
			Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan TPBIS yang diselenggarakan di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah *****	Orang	1070
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan *****	Perpustakaan	1
			Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah *****	%	9,43
			Jumlah Penerbit yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah *****	Penerbit	88
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR *****	Eksemplar	3400
			Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam *****	Penerbit	6
			Jumlah naskah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan *****	Dokumen	0
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan *****	Entry	5000
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan *****	Naskah	1

			Jumlah koleksi naskah kuno di Jawa Tengah yang dialihmediakan ****	Eksemplar	0
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan *****	Eksemplar	6
			Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diolah ****	Eksemplar	0
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi *****	Eksemplar	19
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi *****	Eksemplar	22
	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis *				
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah *	Angka	73,78
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah **			
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah **	Angka	85,45
			Persentase tingkat pelayanan umum,	%	100

			kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***		
			Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *****	%	100
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	5
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	5
			Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *****	Dokumen	1
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	147
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	1
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *****	Dokumen	1
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1
			Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	0
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,	Dokumen	1

			dan Penilaian Kinerja Pegawai *****		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	20
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *****	%	100
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	1
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu *****	Laporan	1
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	1
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	1

			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	45
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	1
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	45
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	5
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	1
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	165
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	2

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	15
			Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	15
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	105
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	5
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	16

1.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah adalah proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko-risiko strategis yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Proses ini bertujuan untuk mengelola risiko-risiko prioritas yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah, sehingga pencapaian tujuan strategis dapat dioptimalkan. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut.

Tabel 3.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	16	Layanan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurun	Melaksanakan monev pelaksanaan Standar Pelayanan dan pengembangan jenis layanan yang semakin mudah diakses oleh masyarakat	Kepala Dinas	Triwulan IV
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Perubahan kebijakan di tingkat nasional	16	Tidak terkelolanya risiko dengan baik	1. Rendahnya tingkat pembangunan literasi	Mengidentifikasi risiko, mengendalikan dan memantau efektivitas pengendalian	Kepala Dinas	Triwulan IV

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
					masyarakat at 2. Penyelenggaraan kearsipan n Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan NSPK	risiko		
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Lembaga	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan LKD Provinsi	Aspek pengelolaan arsip belum sesuai NSPK	16	1. Belum semua Pedoman Kearsipan di level daerah	Pengolahan arsip tidak maksimal	1. Merevisi Pedoman Kearsipan Daerah 2. Pemenuhan	Kepala Dinas	Triwulan IV

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Kearsipan Daerah Provinsi				sesuai dengan level di atasnya 2. Sarpras pengolahan arsip dinamis inaktif dan statis belum memadai		sarpras kearsipan sesuai NSPK		
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Persentase arsip bersejarah yg ditetapkan sebagai MKB	Arsip bersejarah yang diajukan tidak teregister sebagai MKB	16	- Arsip statis yang diajukan tidak memenuhi kualifikasi - Tidak terfasilitasi anggaran pemenuhan	Arsip bersejarah tidak teregister sebagai MKB sehingga pemanfaatannya terbatas	- Koordinasi dengan bidang Pengolahan dan pelestarian Arsip - Melakukan penelusuran arsip sesuai	Kepala Dinas	Triwulan IV

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
				n		tema yang diajukan Memori Kolektif Bangsa.		
Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Minat membaca masyarakat masih rendah	16	- Kurangnya SDM berkompeten dalam mempublikasikan dan mempromosikan Pembudayaan Kegemaran Membaca - Kurang terfasilitas	Tingkat kegemaran membaca masyarakat rendah	Melakukan pembinaan dan memfasilitasi untuk peningkatan budaya gemar membaca	Kepala Dinas	Triwulan IV

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
				inya media promosi tingkat kegemara n membaca - Masyarak at lebih menyukai media sosial daripada membaca buku"				

Keterangan:

- Yang disajikan dalam tabel merupakan risiko prioritas yang merupakan hasil proses manajemen risiko;
- Kertas kerja manajemen risiko dilampirkan dalam dokumen Renja PD.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tabel 4.1
Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan kearsipan Provinsi Jawa Tengah									2.175.000.000		2.400.000.000
						Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Angka	96,27		96,37	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Prov Jateng								2.175.000.000		2.400.000.000
						Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Angka	97,29	1.475.000.000	97,39	1.600.000.000
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						2.850.000.000		3.195.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	%	44,74	375.000.000	47,37	455.000.000
		2.24.02.1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi					375.000.000		455.000.000
						Jumlah Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya minimal baik	Lembaga	34	150.000.000	36	180.000.000
		2.24.02.1.01.0012			Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Lembaga	117	150.000.000	117	180.000.000
						Jumlah OPD, BUMD, Ormas, Orpol yang mendapatkan pembinaan kearsipan	Instansi	51	125.000.000	51	150.000.000
		2.24.02.1.01.0008			Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	Instansi	51	125.000.000	51	150.000.000
						Jumlah arsiparis yg tersertifikasi di Provinsi Jawa Tengah	Orang	5	100.000.000	5	125.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2.24.02.1.01.0009			Penyusunan Database Arsiparis	Jumlah arsiparis	Dokumen	1	100.000.000	1	125.000.000
						Persentase pengelolaan arsip statis provinsi	%	79,15	575.000.000	85,17	610.000.000
		2.24.02.1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi					575.000.000		610.000.000
						Jumlah arsip statis yang terkelola	Arsip	146012	575.000.000	158012	610.000.000
		2.24.02.1.02.0003			Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Orang yang diwawancarai	Orang	2	75.000.000	2	85.000.000
		2.24.02.1.02.0005			Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	1500	100.000.000	1500	125.000.000
		2.24.02.1.02.0006			Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	Arsip	13500	400.000.000	13500	400.000.000
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						2.850.000.000		3.195.000.000
						Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	%	44,74	375.000.000	47,37	455.000.000
		2.24.02.1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi					375.000.000		455.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						Jumlah Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya minimal baik	Lembaga	34	150.000.000	36	180.000.000
		2.24.02.1.01.0012			Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Lembaga	117	150.000.000	117	180.000.000
						Jumlah OPD, BUMD, Ormas, Orpol yang mendapatkan pembinaan kearsipan	Instansi	51	125.000.000	51	150.000.000
		2.24.02.1.01.0008			Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	Instansi	51	125.000.000	51	150.000.000
						Jumlah arsiparis yg tersertifikasi di Provinsi Jawa Tengah	Orang	5	100.000.000	5	125.000.000
		2.24.02.1.01.0009			Penyusunan Database Arsiparis	Jumlah arsiparis	Dokumen	1	100.000.000	1	125.000.000
						Persentase pengelolaan arsip statis provinsi	%	79,15	575.000.000	85,17	610.000.000
		2.24.02.1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi					575.000.000		610.000.000
						Jumlah arsip statis yang terkelola	Arsip	146012	575.000.000	158012	610.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2.24.02.1.02.0003			Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Orang yang diwawancarai	Orang	2	75.000.000	2	85.000.000
		2.24.02.1.02.0005			Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	1500	100.000.000	1500	125.000.000
		2.24.02.1.02.0006			Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	Arsip	13500	400.000.000	13500	400.000.000
		2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						525.000.000		535.000.000
						Persentase peningkatan OPD yang mampu melaksanakan pemusnahan arsip inaktif/masa retensi habis	%	66,67	75.000.000	76,19	85.000.000
		2.24.03.1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun					75.000.000		85.000.000
						Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 thn	Arsip	10000	75.000.000	10000	85.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2.24.03.1.01.0004			Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	10000	75.000.000	10000	85.000.000
						Persentase pemulihan arsip akibat bencana	%	20,34	250.000.000	26,34	250.000.000
		2.24.03.1.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi					250.000.000		250.000.000
						Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi , identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan akibat bencana	Arsip	11,4	250.000.000	11,76	250.000.000
		2.24.03.1.02.0001			Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	600	250.000.000	600	250.000.000
						Persentase peningkatan arsip yang diselamatkan melalui alihmedia	%	11,4	200.000.000	11,76	200.000.000
		2.24.03.1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi					200.000.000		200.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						Jumlah Arsip yang dialih-mediakan	Arsip	20,34	200.000.000	26,34	200.000.000
		2.24.03.1.04.0002			Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	670	200.000.000	770	200.000.000
						Persentase arsip bersejarah yang ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB)	%	50	700.000.000	60	800.000.000
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						2.100.000.000		2.400.000.000
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85,7	700.000.000	85,8	800.000.000
		2.24.02.1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi					700.000.000		800.000.000
						Jumlah Arsip yang terlayankan	Arsip	1000	250.000.000	1000	300.000.000
		2.24.02.1.03.0001			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna	3500	250.000.000	3600	300.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	Unit	41	450.000.000	41	500.000.000
		2.24.02.1.03.0002			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Laporan	4	450.000.000	4	500.000.000
Meningkatkan literasi masyarakat									3.181.804.000		3.448.505.000
						Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	15,76		15,99	
	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat								3.181.804.000		3.448.505.000
						Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (NTGM)	Angka	76,7	3.181.804.000	78,5	3.448.505.000
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						5.586.000.000		5.950.000.000
						Persentase penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai SNP	%	45,27	1.165.000.000	46,15	1.045.000.000
		2.23.02.1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					770.000.000		860.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi	Perpustakaan	4	230.000.000	4	265.000.000
		2.23.02.1.01.0016			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen	1	100.000.000	1	110.000.000
		2.23.02.1.01.0017			Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Perpustakaan	10	130.000.000	15	155.000.000
						Jumlah Pustakawan yang lulus Sertifikasi	Orang	25	125.000.000	30	130.000.000
		2.23.02.1.01.0006			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Orang	30	125.000.000	35	130.000.000
						Jumlah Perpustakaan Sekolah sesuai kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya sesuai SNP	Perpustakaan	270	30.000.000	285	35.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2.23.02.1.01.0004			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	10	30.000.000	15	35.000.000
		2.23.02.1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi					1.560.000.000		1.230.000.000
						Jumlah pembudayaan gemar membaca di satuan pendidikan menengah, dan khusus	Kegiatan	2	280.000.000	2	290.000.000
		2.23.02.1.02.0001			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus	13	280.000.000	13	290.000.000
						Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat	Kegiatan	2	500.000.000	2	325.000.000
		2.23.02.1.02.0003			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang	12	150.000.000	12	175.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2.23.02.1.02.0006			Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang	1	350.000.000	1	150.000.000
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85,2	1.628.000.000	85,3	1.930.000.000
		2.23.02.1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					3.156.000.000		3.735.000.000
						Peningkatan jumlah koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	%	5	1.063.000.000	5	1.330.000.000
		2.23.02.1.01.0009			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	10386	1.063.000.000	10905	1.330.000.000
						Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Jenis	12	485.000.000	14	500.000.000
		2.23.02.1.01.0002			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Perpustakaan	6	435.000.000	6	437.500.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2.23.02.1.01.0015			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	1	50.000.000	1	62.500.000
						Jumlah kunjungan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Orang	3166650	30.000.000	3214300	37.500.000
		2.23.02.1.01.0011			Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Dokumen	1	30.000.000	1	37.500.000
		2.23.02.1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		125.000.000
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan TPBIS yang diselenggarakan di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Orang	1070	50.000.000	1080	62.500.000
		2.23.02.1.02.0004			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan	1	50.000.000	1	62.500.000
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						5.586.000.000		5.950.000.000
						Persentase penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai SNP	%	45,27	1.165.000.000	46,15	1.045.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2.23.02.1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					770.000.000		860.000.000
						Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi	Perpustakaan	4	230.000.000	4	265.000.000
		2.23.02.1.01.0016			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen	1	100.000.000	1	110.000.000
		2.23.02.1.01.0017			Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Perpustakaan	10	130.000.000	15	155.000.000
						Jumlah Pustakawan yang lulus Sertifikasi	Orang	25	125.000.000	30	130.000.000
		2.23.02.1.01.0006			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Orang	30	125.000.000	35	130.000.000
						Jumlah Perpustakaan Sekolah sesuai kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya sesuai SNP	Perpustakaan	270	30.000.000	285	35.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2.23.02.1.01.0004			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	10	30.000.000	15	35.000.000
		2.23.02.1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi					1.560.000.000		1.230.000.000
						Jumlah pembudayaan gemar membaca di satuan pendidikan menengah, dan khusus	Kegiatan	2	280.000.000	2	290.000.000
		2.23.02.1.02.0001			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus	13	280.000.000	13	290.000.000
						Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat	Kegiatan	2	500.000.000	2	325.000.000
		2.23.02.1.02.0003			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang	12	150.000.000	12	175.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2.23.02.1.02.0006			Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang	1	350.000.000	1	150.000.000
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85,2	1.628.000.000	85,3	1.930.000.000
		2.23.02.1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					3.156.000.000		3.735.000.000
						Peningkatan jumlah koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	%	5	1.063.000.000	5	1.330.000.000
		2.23.02.1.01.0009			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	10386	1.063.000.000	10905	1.330.000.000
						Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Jenis	12	485.000.000	14	500.000.000
		2.23.02.1.01.0002			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Perpustakaan	6	435.000.000	6	437.500.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2.23.02.1.01.0015			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	1	50.000.000	1	62.500.000
						Jumlah kunjungan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Orang	3166650	30.000.000	3214300	37.500.000
		2.23.02.1.01.0011			Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Dokumen	1	30.000.000	1	37.500.000
		2.23.02.1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		125.000.000
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan TPBIS yang diselenggarakan di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Orang	1070	50.000.000	1080	62.500.000
		2.23.02.1.02.0004			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan	1	50.000.000	1	62.500.000
		2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						388.804.000		473.505.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	%	9,43	388.804.000	9,65	473.505.000
		2.23.03.1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi					136.500.000		170.625.000
						Jumlah Penerbit yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Penerbit	88	136.500.000	93	170.625.000
		2.23.03.1.01.0001			Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eksemplar	3400	23.500.000	3800	29.375.000
		2.23.03.1.01.0002			Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Penerbit	6	113.000.000	6	141.250.000
		2.23.03.1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah					79.976.000		99.970.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						Jumlah naskah Katalog Induk Derah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	Dokumen	0	79.976.000	0	99.970.000
		2.23.03.1.02.0001			Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	Entry	5000	51.988.000	5600	64.985.000
		2.23.03.1.02.0002			Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Naskah	1	27.988.000	1	34.985.000
		2.23.03.1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi					42.328.000		52.910.000
						Jumlah koleksi naskah kuno di Jawa Tengah yang dialih-mediakan	Eksemplar	0	42.328.000	0	52.910.000
		2.23.03.1.03.0003			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	6	42.328.000	7	52.910.000
		2.23.03.1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					130.000.000		150.000.000
						Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diolah	Eksemplar	0	130.000.000	0	150.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2.23.03.1.04.0001			Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar	19	60.000.000	20	70.000.000
		2.23.03.1.04.0002			Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar	22	70.000.000	23	80.000.000
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis									40.743.750.000		44.704.940.000
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	73,78		73,98	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								40.743.750.000		44.704.940.000
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	85,45	40.743.750.000	85,55	44.704.940.000
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH						40.743.750.000		44.704.940.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			AN DAERAH PROVINSI								
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	40.743.750.000	100	44.704.940.000
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					201.250.000		231.440.000
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	201.250.000	100	231.440.000
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	155.250.000	5	178.540.000
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	46.000.000	5	52.900.000
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					26.950.000.000		27.225.000.000
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	26.950.000.000	1	27.225.000.000
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	147	26.600.000.000	147	26.850.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	350.000.000	1	375.000.000
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					175.000.000		185.000.000
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	175.000.000	1	185.000.000
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	150.000.000	1	160.000.000
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					140.000.000		164.000.000
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	140.000.000	100	164.000.000
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	20.000.000	0	22.000.000
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	Dokumen	1	20.000.000	1	22.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						Penilaian Kinerja Pegawai					
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	100.000.000	20	120.000.000
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.325.000.000		1.472.000.000
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.325.000.000	100	1.472.000.000
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	75.000.000	1	90.000.000
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	150.000.000	1	160.000.000
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	1	45.000.000
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	220.000.000	1	250.000.000
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	80.000.000	1	80.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	40.000.000	1	42.000.000
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	200.000.000	1	220.000.000
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	400.000.000	1	450.000.000
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	40.000.000	1	50.000.000
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	75.000.000	1	85.000.000
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.150.000.000		7.850.000.000
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	45	4.150.000.000	30	7.850.000.000
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	350.000.000	1	850.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1.200.000.000	1	1.500.000.000
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	45	1.400.000.000	30	2.500.000.000
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	1.200.000.000	7	3.000.000.000
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.397.500.000		4.707.500.000
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	4.397.500.000	1	4.707.500.000
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	7.500.000	1	7.500.000
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1.800.000.000	1	2.000.000.000
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	90.000.000	1	100.000.000
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.500.000.000	1	2.600.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.405.000.000		2.870.000.000
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	165	3.405.000.000	165	2.870.000.000
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	75.000.000	2	75.000.000
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	150.000.000	16	175.000.000
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	15	20.000.000	15	20.000.000
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	105	250.000.000	105	250.000.000
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	2.560.000.000	5	2.000.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2026		2027	
								Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	16	350.000.000	16	350.000.000

4.2 Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Tabel 4.2

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Program/Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan jumlah Perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	Pelaksanaan Re-Akreditasi belum berjalan sesuai masa berlakunya sertifikat akreditasi perpustakaan	12	Berkurangnya prioritas anggaran terkait akreditasi	Belum semua perpustakaan mengikuti akreditasi	Dinas Arpus Provinsi akan memfasilitasi dan mendampingi pelaksanaan reakreditasi dan pendataan perpustakaan	Kabid Pengembangan Perpustakaan	TW III
Kegiatan Pengelolaan perpustakaan Tk Daerah Provinsi	Jumlah Pustakawan yang lulus Sertifikasi	Minimnya SDM Perpustakaan yang tersertifikasi	12	Keterbatasan kegiatan uji sertifikasi pustakawan	Tidak semua SDM Perpustakaan dapat mengikuti uji sertifikasi	Melaksanakan fasilitasi kegiatan uji sertifikasi Pustakawan	Kelompok Kerja Pembinaan Perpustakaan	TW II
Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tk. Daerah provinsi	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	Rendahnya partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	12	Kurangnya minat baca dan literasi pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	Menurunnya minat baca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	Mengadakan Kegiatan Lomba Bidang Perpustakaan; Bimtek Literasi Informasi untuk Pustakawan, Guru dan Pegiat Literasi; Lomba Video Konten Literasi; Pemberian Penghargaan Gerakan Gemar Membaca; dan Pemilihan Duta Baca Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Kelompok Kerja Pembudayaan Kegemaran Membaca	TW I dan TW II

Kegiatan Pengelolaan perpustakaan Tk Daerah Provinsi	Persentase peningkatan koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	Peningkatan koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah belum sesuai SNP	12	Penentuan target kinerja tidak berdasarkan judul	Peningkatan koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam jumlah eksemplar	Peningkatan ketersediaan keberagaman koleksi perpustakaan dengan menambah judul dan meminimalkan eksemplar	Kelompok Kerja Akuisisi Dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	TW IV
Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah koleksi etnis budaya nusantara yang diolah	Koleksi etnis budaya nusantara daerah Jawa Tengah sedikit	12	Pengolahan koleksi etnis budaya nusantara masih dari hibah masyarakat	Kebutuhan informasi Koleksi etnis budaya nusantara belum terpenuhi	Seleksi dan akuisisi dari hibah masyarakat	Kelompok Kerja Akuisisi Dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	TW IV
Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya minimal baik	Jumlah arsip statis pada LKD Provinsi/Kabupatten/Kota masih sangat terbatas	12	Perangkat Daerah yang menyerahkan arsip bernilai statis masih kurang	Pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah belum sampai pada tahap penyusutan (usul serah dan usul Musnah)	Pendampingan terhadap Perangkat Daerah dilakukan secara rutin dan berkelanjutan	Kelompok Kerja Pengawasan Kearsipan	TW IV
Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah arsiparis yg tersertifikasi di Jawa Tengah	Kwantitas belum sebanding dengan kualitas arsiparis	16	Belum semua SDM kearsipan tersertifikasi	Jumlah SDM Kearsipan mayoritas belum tersertifikasi	Melakukan koordinasi dengan Arsip Nasional RI dan BPSDMD Prov. Jateng untuk pelaksanaan sertifikasi maupun uji kompetensi bidang kearsipan	Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	TW IV
Kegiatan Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Tidak terselamatkannya arsip yang bernilai guna kesejarahan dan bernilai guna nasional	12	Kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya arsip untuk di masa yang akan datang untuk sumber primer sejarah	Arsip yang bernilai guna kesejarahan dan bernilai guna nasional tidak terselamatkan	Mensosialisasikan penyelamatan arsip yang bernilai guna kesejarahan dan bernilai guna nasional ke PD	Kelompok Kerja Akuisisi Arsip	TW I sampai dengan TW IV

Kegiatan Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Jumlah arsip yg dinyatakan hilang	Tidak terselamatkannya arsip yang dinyatakan hilang	12	Arsip belum diketahui keberadaannya	Tidak terselamatkannya informasi dan fisik arsip yang terkandung pada arsip yang dinyatakan hilang	Mengidentifikasi keberadaan arsip yang dinyatakan hilang untuk dilakukan akuisisi/penyelamatan	Kelompok Kerja Akuisisi Arsip	TW I sampai dengan TW IV
---	-----------------------------------	---	----	-------------------------------------	--	--	-------------------------------	--------------------------